

## KEMISKINAN, KESENJANGAN PENDAPATAN, DAN BANTUAN SOSIAL

M. Zahrin Piliang

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Ulum Terpadu Medan  
[@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:@stebisalulumterpadu.ac.id),

---

### *Abstract*

---

Indonesia's economic development does not necessarily bring prosperity to the people. Poverty is still a major problem. Until September 2022, there will still be 9.57 percent of poor people in Indonesia. This figure refers to the poverty line created by the World Bank, based on the 2011 purchasing power parity (PPP) of US\$ 1.90 per person per day. Various poverty alleviation programs have been carried out by the government, especially since the New Order. The Indonesian economy shows that efforts to reduce poverty are continuing. However, along with that, income disparities also occur. The chasm continues to deepen. This research aims to see to what extent the problem of poverty and income inequality has been successfully reduced. The method used is library research.

Based on the research results, it was found that the poverty rate has still not been completely resolved. With the 2017 PPP, purchasing power parity is US\$ 2.15 per person per day or Rp. 32,812.-. resulting in 13 million Indonesian citizens who were originally in the lower middle class becoming poor, so that the poverty rate could reach 40 percent. Indonesia's Gini ratio over a period of 30 years only fell by 0.07 or 7 percent. During the same time, the Indonesian economy grew by an average of 7 percent.

Social Assistance is a Social Safety Net instrument taken by the government to ease the burden on the poor. One form of social assistance is the Family Hope Program (PKH) to meet the basic needs of the community. In neighborhood 8, Sidorejo Village, Medan Tembung District, Medan City, PKH assistance has had a positive influence in providing basic needs, but has less positive influence on aspects of housing, clothing and health needs.

**Keywords:** *UPZ, Economic Empowerment, Zakat*

---

*Abstrak*

---

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak serta merta menyejahterakan rakyat. Kemiskinan masih menjadi masalah utama. Hingga September 2022 masih terdapat 9,57 persen orang miskin Indonesia. Angka ini mengacu pada garis kemiskinan yang dibuat Bank Dunia, berdasar pada paritas daya beli (PPP) 2011 US\$ 1,90 per orang per hari. Beragam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, terutama sejak Orde Baru. Perekenomian Indonesia menunjukkan, upaya pengurangan kemiskinan itu terus dilakukan. Namun seiring dengan itu kesenjangan pendapatan juga terjadi. Jurangnya terus makin mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah berhasil dikurangi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa angka kemiskinan masih belum sepenuhnya teratasi. Dengan PPP 2017 paritas daya beli US\$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.812,-, mengakibatkan 13 juta warga Indonesia yang semula masuk golongan menengah bawah menjadi miskin, sehingga angka kemiskinan bisa menembus 40 persen. Gini rasio Indonesia selama kurun waktu 30 tahun hanya turun 0,07 atau 7 persen. Dalam waktu yang sama perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh 7 persen.

Bantuan Sosial adalah instrumen Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang diambil pemerintah untuk meringankan beban penduduk miskin. Salah satu bentuk bantuan sosial itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat. Di lingkungan 8, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan bantuan PKH itu memberikan pengaruh positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar, namun kurang berpengaruh positif terhadap aspek kebutuhan rumah, pakaian, serta kesehatan.

***Kata Kunci: UPZ, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat***

---

**A. Pendahuluan** September 2022 tercatat 9,57 persen atau Kemiskinan masih menjadi 26,36 juta penduduk Indonesia berada di permasalahan utama di Indonesia. Data bawah garis kemiskinan. Di Sumatera BPS menunjukkan bahwa hingga Utara, kelompok miskin ini bertengger di

angka 8,33 persen pada September 2022. Angka itu setara dengan 1,26 juta jiwa dari 13 juta penduduk Sumatera Utara. Sementara di kota Medan dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 8,07 persen.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 mencapai 7,50 persen, sedang di September 2022 naik menjadi 7,53 persen. Ini bermakna, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tersebut naik 0,16 juta orang dari semula 11,82 juta orang menjadi 11,98 juta orang. Di pedesaan, persentase penduduk miskin sebesar 12,29 persen pada Maret 2022, naik menjadi 12,36 persen di September 2022. Dengan kata lain hingga September 2022 penduduk miskin di pedesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang menjadi 14,38 juta orang, dari semula 14,34 juta orang. Badan Pusat Statistik juga melaporkan, Garis Kemiskinan Makanan pada September 2022 sebesar Rp 535.547,00 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan sebesar Rp 397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 138.422,00 (25,85 persen). Hingga September 2022

itu, secara rata-rata, rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.324.274,00 per rumah tangga miskin per bulan.

Angka kemiskinan tersebut di atas, terlihat sudah satu digit, berarti ada penurunan angka kemiskinan. Namun jangan silap, angka itu menggunakan pendekatan moneteris. Dalam pendekatan moneteris, kesejahteraan seseorang diukur dari total konsumsi (kalori) yang dinikmatinya. Indikator yang digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan ini hendak dikatakan, bahwa dari pendekatan lain, angka-angka di atas jumlahnya bisa berubah karena ukuran yang digunakan tidak sama. Demikian pula jika dilihat dari gap pendapatan yang demikian menganga antara orang kaya dengan orang miskin.

Sekalipun misalnya masih menggunakan pendekatan moneteris, angka kemiskinan di Indonesia tetap

tinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Misalnya, baru-baru ini Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan. Semula basis perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) 2011 US\$ 1,90 per orang per hari dengan kurs Rp. 15.261,- (Rp. 28.500,-) menjadi mengacu pada Purchasing Power Parity (PPP) 2017 US\$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.812,-. Akibatnya, 13 juta warga Indonesia yang tadinya masuk golongan menengah bawah menjadi jatuh miskin.

Sebagai akibat dari kemiskinan ini, banyak anak-anak yang seharusnya masih berada di bangku sekolah, terpaksa “menunda” pendidikannya karena ketiadaan biaya pendidikan. Bahkan, terkadang, anak-anak yang masih dalam usia pendidikan ini “dipaksa” oleh keadaan membantu ekonomi keluarga. Dampak lain dari kemiskinan ini adalah pengangguran, karena lapangan kerja yang tersedia membutuhkan keterampilan tertentu. Dari pengangguran ini muncul kriminalitas yang ujungnya menimbulkan keresahan sosial dan ketidakamanan. Selanjutnya kemiskinan juga mengakibatkan banyak warga yang sakit, kurang gizi, dan akhirnya meninggal dunia. Begitulah, jika kemiskinan terus

melingkari penduduk suatu negeri.

Bantuan sosial bukanlah upaya mengentaskan kemiskinan, melainkan hanya sekedar jaring pengaman sosial (social safety net). Ibarat sakit kepala, bantuan sosial tak lebih sebagai usaha menghilangkan pening, bukan menyembuhkan sakit kepala. Seharusnya, pemerintah lebih memprioritaskan program-program pengurangan kemiskinan berbasis kondisi riil masyarakat lokal; mengawal kebijakan subsidi gas untuk rakyat miskin benar-benar hanya dikonsumsi oleh rakyat miskin, bukan membiarkan gas tersebut dikonsumsi oleh mereka yang berstatus aparatur sipil negara, TNI/Polri, dan warga kelas menengah lainnya. Yang tak kalah pentingnya juga instrumen kebijakan fiskal yang diambil mesti mampu menekan laju kenaikan harga-harga yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat

Pemerintah sesungguhnya memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga miskin hidup lebih layak. Tetapi mengapa program-program pengurangan kemiskinan itu tidak kunjung berhasil mengatasi kemiskinan di Indonesia?

## B. Berbagai Ukuran Kemiskinan

Telah disinggung, bahwa angka kemiskinan yang dikemukakan di atas, barulah satu aspek sudut pandang saja, yaitu moneteris. Amartya Sen misalnya mengaitkan kemiskinan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Amartya Sen hendak mengatakan, kemiskinan timbul jika masyarakat itu tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai; demikian juga dengan kondisi kesehatannya yang buruk. Bagi Amartya Sen, kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensional. Jadi, tidak berfokus pada angka-angka saja.

Di Indonesia, terdapat berbagai ukuran atau pandangan tentang kemiskinan, yang dijadikan pijakan untuk program-program jaring pengaman sosial (*social safety net*), terutama oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun, dalam menentukan jumlah penduduk miskin, pemerintah secara resmi masih menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Berikut disajikan beberapa ukuran atau pandangan tentang kemiskinan tersebut.

### 1. Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, dari sisi ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

### 2. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,

Kementerian Sosial menggunakan ukuran kemiskinan, di antaranya:

- a. Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

### 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Lembaga ini mempunyai cara dan metodologi tersendiri untuk menentukan garis kemiskinan, biasa disebut *had kifayah*. Dalam hal ini, *had kifayah* merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat, mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan *had kifayah* meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat

tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

#### 4. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi “kebutuhan dasar” yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Dengan sangat jelas terbaca bahwa kemiskinan terkait erat dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, aksesibilitas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Banyak sekali variable yang melekat pada orang miskin. Karena itu, terhadap konsep kemiskinan ini, dirasakan

perlu pendalaman, sebab akan berpengaruh terhadap program penanggulangan kemiskinan. Sebab, setiap rezim pemerintahan selalu menyodorkan program pengentasan kepada publik miskin.

Kata miskin terambil dari Bahasa Arab, *sakana*, berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masakin* ialah bentuk jama' dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'ah*.

Kemiskinan itu tidak tunggal, terdapat sejumlah konsep kemiskinan, dengan ukuran yang berbeda-beda. Di antaranya, Sayogyo, mengukur kemiskinan dengan parameter tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan, dan 320 kg di daerah pedesaan. Banyak yang memaklumi ukuran yang digunakan Sayogyo ini, karena dinamika kehidupan di kota dan di desa memang berbeda, sehingga memengaruhi pola pengeluaran. BPS menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 504.469 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp 377.598 per kapita per bulan untuk

pengeluaran makanan, dan sisanya untuk pengeluaran bukan makanan.

Scott melihat kemiskinan dari sudut pendapatan rata-rata per kepala (*income per capita*). Sedangkan Amartya Sen memandang kemiskinan dari pendekatan kemampuan (*the capability approach*). Menurut Sen pembangunan seharusnya dilihat sebagai ekspansi dari kemampuan manusia (*human capabilities*), bukan sekedar memaksimalkan kegunaan (*utility*) atau proksi atas kegunaan itu, yakni pendapatan. Amartya Sen, melihat bahwa ilmu ekonomi modern, sudah begitu lama meninggalkan dimensi moral, dan hanya asyik berurusan dengan pendapatan dan kekayaan, sehingga distribusi kekayaan menjadi tidak merata. Bagi Sen, ilmu ekonomi juga mestilah memiliki dimensi kemanusiaan dan moral yang kuat. Atas dasar ini, Sen berpendapat pembangunan selalu berkaitan dengan usaha untuk mengupayakan munculnya bangunan kebebasan nyata dan atau pengembangannya yang lebih besar yang dapat dinikmati oleh rakyat. Dengan begitu kemiskinan tidak hanya berkuat pada angka-angka, melainkan juga pada aksesibilitas sumber-sumber ekonomi bagi kaum miskin tersebut.

Ada pula yang memotret kemiskinan diukur melalui tingkat pendapatan dan pola waktu. Adalah Sastraamadja, sebagaimana disebut Maryam Sangadji, menyatakan, bahwa berdasarkan ukuran pendapatan, kemiskinan dibedakan dalam kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relatif*. Kemiskinan absolut adalah keadaan individu yang pendapatannya tidak cukup memenuhi kebutuhan primer sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedang kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang diakibatkan kebijakan pembangunan yang belum menjangkau lapisan masyarakat, misalnya pengangguran karena kurangnya lapangan kerja.

Sementara itu, dari pola waktu, kemiskinan dapat diteropong dari (a) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis, atau turun menurun; (b) *cyclical poverty*, yakni kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (d) *accident poverty*, kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Lebih lanjut, seperti dikutip Maryam Sangadji, Kartasmita mengatakan, seseorang dinyatakan miskin secara absolut, jika tingkat pendapatannya lebih rendah daripada kemiskinan absolut, atau ketika jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Sedang Lincolin Arsyad menyebutkan, kemiskinan mutlak terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok, atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup secara layak. Dengan pernyataan di atas hendak dikatakan, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasarnya.

Beberapa rujukan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang miskin adalah mereka yang mengalami kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka (*basic needs*) baik dalam aspek pangan, sandang, papan, maupun kesehatan dan pendidikan.

### C. Program Penanggulangan Kemiskinan

Michael P. Todaro menyebut inti pembangunan menyangkut 3 (tiga) hal berikut, *pertama*, agar terjadi peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan hidup yang pokok; *kedua*, peningkatan standar hidup rakyat ke arah yang lebih baik; dan, *ketiga*, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial semua lapisan masyarakat.

Sejak pemerintahan Orde Baru, program pembangunan untuk pengurangan kemiskinan terus menerus dilakukan. Hal itu tercermin dalam delapan jalur pemerataan, yaitu : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan. Semua itu dilaksanakan dengan pola umum pembangunan jangka Panjang (25-30 tahun) secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita.

Kebijakan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga peningkatan pemerataan pendapatan. Dengan begitu,

pemerintah Orde Baru berharap terjadi pengurangan kesenjangan pendapatan, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan. Dalam catatan kebijakan ekonomi Indonesia, terbaca bahwa pemerintah telah dan sedang melakukan 69 program pengurangan kemiskinan. Dengan program yang banyak itu, secara teoritis dimungkinkan terjadinya pengurangan kemiskinan. Selain program yang banyak, pengelolaan pemerintahan yang desentralistis pun dapat mendorong percepatan pelayanan terhadap masyarakat miskin. Bukan hanya itu, diyakini, programnya pun makin tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, apa yang secara teoritis diperkirakan akan berhasil, fakta di lapangan, berdasarkan sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program pengurangan kemiskinan itu ternyata belum memperlihatkan keberhasilan yang signifikan, bahkan kondisinya sama saja sebelum program-program pengurangan kemiskinan itu diluncurkan.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden, beliau menegaskan komitmennya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Komitmen tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep *new*

*deal* pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari *new deal* ini tertuang dalam prinsip *triple track strategy* : *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track pertama* dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan, mengutamakan ekspor dan investasi. *Track kedua*, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan *track ketiga*, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Lebih lanjut, Sangaji menguraikan, pada masa pemerintahan SBY-JK 2004, melalui kebijakan anggaran, telah disalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana sektoral ke daerah. Lewat 14 bank umum, pemerintah telah pula meluncurkan dana kredit bagi UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) sebesar 32,5 triliun. Menurut pemerintah, dana tersebut 90 persen tersalur ke daerah. Dengan dana tersebut diharapkan membuka peluang dan akses bagi masyarakat miskin. Namun, upaya itu tampaknya belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Mengapa belum berhasil? Karena ketidakjelasan konsep pengurangan kemiskinan yang sesuai karakteristik dan

potensi masing-masing daerah. Juga karena pemerintah tidak memiliki peta masalah serta potensi yang ada disetiap masyarakat.

Pada tahun 2003 misalnya, Yusuf Kalla pernah mengatakan, perlu adanya komitmen bersama guna tercapainya sasaran penurunan penduduk miskin, dari 18 persen pada tahun 2002 menjadi 14 persen 2004 (lihat Propenas 2002-2004). Pemerintah sendiri sejak April 2001 telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK). Sekurang-kurangnya ada empat peran yang harus disangga lembaga ini, *pertama*, sebagai *koordinator*, badan ini bertugas mengoordinasikan perumusan standar-standar dasar mengenai konsep kemiskinan yang digunakan oleh berbagai instansi di pusat dan daerah. *Kedua*, sebagai *katalisator*, badan ini berupaya memecahkan kendala-kendala utama dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, sebagai *mediator*, badan ini diharapkan menjadi wahana untuk menampung beragam aspirasi. *Keempat*, sebagai *fasilitator*, badan ini mampu menjadi penghubung antara para donor

dan pelaku utama katalisator, mediator, dan fasilitator.

Sebelum ini, di masa pemerintahan Orde Baru banyak program yang diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan, misalnya (a) Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan; (b) Inpres Kesehatan, dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan; (c) Inpres Pendidikan, bertujuan memberikan Pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah; dan (d) Inpres obat-obatan yang bertujuan memberikan obat-obatan yang murah kepada masyarakat miskin,

Dengan mengutip Tarumingkeng, (2001 : 18), Sangaji menambahkan, di samping Inpres, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk pedesaan, di antaranya melalui (i) Kredit Usaha Tani (KUT) untuk memudahkan petani mendapatkan modal; (ii) kredit perbankan (Kredit Candak Kulak) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan modal di luar sektor

pertanian; (iii) pembebasan pajak untuk hasil pertanian ; (iv) subsidi atas pupuk dan obat-obatan pertanian; dan (v) operasi beras murah dan beberapa program lainnya.

Dalam rangka menerjemahkan paradigma baru yang memaklumkan bahwa “orang miskin adalah aktor utama” dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa isu sentral yang patut diperhatikan, yaitu :

1. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat local specific. Maksudnya bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai kondisi di daerah tersebut;
2. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor produksi melalui (i) penetapan kebijakan land reform lewat peraturan daerah; (ii) terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan; (iii) terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha ekonomi rakyat; dan (iv) perlunya partisipasi yang lebih proporsional bagi kaum wanita dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan, dan pemantauan

dari kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan;

3. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tanga;

4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif;

5. Agenda penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda nasional dengan dua area sasaran aksi, yaitu (i) menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui upaya peningkatan pendapatan; dan (ii) meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif dan tepat menjangkau penduduk miskin;

6. Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat penduduk miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan;

7. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak

dapat lepas dari berbagai hal yang terkait, yaitu (i) terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik (good governance); (ii) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (iii) kerja sama (partnership) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (civil society) dalam penanggulangan kemiskinan; dan (iv) upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan setempat;

8. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi harus memenuhi syarat (i) sederhana agar mudah dipahami serta dapat menggerakkan aktivitas ekonomi setempat; (ii) open menu, dalam arti masyarakat lokal diberi ruang otonom untuk menentukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan; (iii) partisipasi yang menyeluruh, dalam arti pengelolaannya melibatkan multi stakeholders; (iv) keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui dan memberikan kontribusi bahkan melakukan kompetisi; dan (v) pengelolaan program dan dana yang harus transparan;

9. Operasional strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan (i) koordinasi; (ii) katalisasi; (iii) mediasi; dan (iv) fasilitasi.

#### **D. Kemiskinan Masih Tinggi**

Sekalipun sejumlah program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun, pola kemiskinan selama kurun reformasi ini tidak banyak mengalami penurunan. Jika rasio gini dijadikan sebagai indikator kemiskinan yang dominan, maka rasio gini Indonesia selama kurun waktu 30 tahun hanya turun 0,07 atau 7 persen. Padahal dalam waktu yang sama ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 7 persen. Apabila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sama, ketiga negara itu lebih menunjukkan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan dibanding penurunan angka kemiskinan Indonesia.

Dari analisis yang dilakukan, terdapat perbedaan Indonesia dengan ketiga negara anggota ASEAN itu dalam kaitan penanggulangan kemiskinan dimaksud. Perbedaan itu terutama terlihat pada kebijakan ketiga pemerintahan negara tersebut yang lebih tanggap, lebih terfokus pada isu-isu kemiskinan dibanding pemerintah Indonesia. Faktor lainnya adalah situasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat kondusif di ketiga

negara itu dalam mengimplementasikan kebijakan pengurangan kemiskinan itu sendiri. Inilah yang menyebabkan keberhasilan pembangunan di negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Mereka mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita, dan menekan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertanyaanya, apa yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi? Banyak analisis yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ada yang mengatakan karena sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang semula masuk dalam kategori negara dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tinggi, namun tiba-tiba muncul keguncangan yang juga luar biasa pada tahun 1997 (krisis ekonomi). Pemikiran lain menyebut bahwa pembangunan ekonomi Indonesia yang menggunakan pendekatan Rostow, dengan penekanan pergeseran *aggregate supply* yang disebabkan oleh meningkatnya produksi, khususnya produksi per efektif tenaga kerja ( $y$ ). Disebutkan, di sini  $y$  sangat tergantung pada kapital per efektif tenaga kerja. Secara matematis dapat disebut  $Y =$

$f(k)$ , sedang  $k$  dipengaruhi oleh investasi dan jumlah penduduk.

Selain itu, jurang kesenjangan pendapatan yang demikian dalam termasuk yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Walau pun tingkat kesenjangan cenderung menurun, dari 0,385 pada Oktober 2020 menjadi 0,381 pada September 2022, namun kemiskinan di kota dan di desa justru naik. Jadi, ketimpangan yang seolah-olah turun ini sebenarnya semu. Meskipun persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai rekor terendah dengan 9,82%, penyebarannya tidak merata. Penduduk miskin yang tinggal di desa lebih banyak dari penduduk yang miskin kota. Di Maluku dan Papua, 29,15 persen penduduk yang tinggal di desa masih miskin. Di kota, hanya 5,03 persen penduduk masuk kategori miskin. Di Bali dan Nusa Tenggara, 17,77 persen penduduk desa masuk kategori miskin. Daerah dengan persentase penduduk miskin terendah adalah di Kalimantan, 7,6 persen (di kota 4,33 persen). Menurut Bhima Yudhistira, hal ini disebabkan usaha pemerataan yang dilakukan pemerintah melalui dana desa belum

bekerja optimal karena birokrasi pencairan dana desa masih lambat.

Secara lebih spesifik, penyebab angka kemiskinan masih tinggi, *pertama*, terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran makin bertambah. Jika pun tersedia lapangan kerja, sebagaimana masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin, masih kesulitan mengakses pekerjaan tersebut karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, atau modal. Keterbatasan lapangan kerja ini jugalah yang mengakibatkan kemiskinan struktural masih mengakar di Indonesia. Dengan sendirinya angka kemiskinan pun tak dapat dihindari. *Kedua*, rendahnya tingkat Pendidikan. Ini berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak terjangkau oleh tingkat pendidikan angkatan kerja. Distribusi pendidikan belum merata dan banyak mendapat hambatan terutama pada sarana, prasarana, sumber daya guru dan tenaga kependidikan serta terbatasnya dana penunjang operasional pendidikan.

*Ketiga*, harga kebutuhan pokok tinggi. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa

masyarakat miskin selalu kekurangan, bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) sehari-hari. Lebih dari 60-80 persen penghasilan masyarakat miskin digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan saja. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak mereka harus memotong belanja keperluannya dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. *Keempat*, akses sumber daya yang terbatas. Kemiskinan akan terus berlanjut, karena adanya keterbatasan sumber daya alam dan sumber modal. Apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau pengetahuan.

#### **E. Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial**

Adalah menjadi penting bagi pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut agar tercipta kondisi sosial yang sejahtera. Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat jelas memerintahkan itu : Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Oleh pemerintah, perintah UUD 1945 tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini menyatakan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dengan demikian, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu UU ini juga menyinggung tentang apa yang disebut fungsi sosial, yaitu kecapan dari warga negara dalam berinteraksi secara baik dengan lingkungannya karena dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, spiritual, budaya yang baik sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut

memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya atau tidak.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 Tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya sebuah keluarga yang sejahtera yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Namun kemiskinan menjadi ancaman nyata tidak hanya bagi negara bahkan bagi kehidupan keluarga kecil yang membuat mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini tentu akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan

sosial apabila dibiarkan tanpa adanya program yang baik.

Untuk mengurangi beban sosial-ekonomi rakyat miskin tersebut, pemerintah menetapkan skema program bantuan bagi masyarakat miskin. Baik program untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk bantuan sosial jangka panjang yang diberikan Kementerian Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial. Bantuan ini disalurkan setiap bulan secara non tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank. Bantuan dimaksud dapat diambil dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam bantuan tersebut penghitungan dibatasi maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga. Sangat

jelas, bantuan sosial ini (PKH) hanyalah jaring pengaman sosial, bukan suatu upaya untuk mengeluarkan warga miskin dari kemiskinannya.

Terhadap bantuan sosial ini, Kementerian Sosial menetapkan kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang kategorinya terdiri atas:

Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000,00 per tahun

Anak usia dini paling banyak 2 (dua) orang di dalam keluarga dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000,00 per tahun

Anak usia sekolah SD/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000,00 per tahun, paling banyak 1 (satu) anak

Anak usia SMP/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 1.500.000,00 per tahun, paling banyak 1 (satu) anak

Anak usia SMA/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 2.000.000,00 per tahun

Lanjut usia dengan usia 60 (enam puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di

dalam keluarga, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.400.000,00 per tahun

Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.400.000,00 per tahun.

Kemiskinan bukanlah takdir. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya kemiskinan, di suatu negara. Di antaranya karena adanya penjajahan suatu negara

terhadap negara lain. Masalahnya akan berbeda jika negara tersebut sudah merdeka. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Mengalami penjajahan selama lebih kurang 350 tahun. Dan telah merdeka selama lebih 73 tahun.

Tetapi mengapa kemiskinan masih terus mewarnai penduduk Indonesia? Tabel di bawah ini akan memperlihatkan beberapa penyebab munculnya kemiskinan.

Tabel 1. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor Penyebab Kemiskinan	
Faktor	Keterangan
Pendidikan dan Keterampilan Rendah	Keterbatasan Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan seseorang masuk ke dalam dunia kerja
Sikap Malas	Malas menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja
Sumber Daya Alam	Sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka
Lapangan Kerja terbatas	Ketika angkatan kerja tidak sebanding dengan dengan lapangan pekerjaan yang ada, maka akan tercipta pengangguran
Keterbatasan Modal	Membuat mereka tidak bisa membuat atau melengkapi bahan dalam rangka menerapkan keterampilan untuk memperoleh penghasilan
Beban Keluarga	Anggota keluarga banyak, namun tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, akan menimbulkan kemiskinan karena semakin meningkat tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi

Jelas sekali kemiskinan akan berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk. Dampak itu bisa berupa pengangguran, kriminalitas, pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi muda yang suram.

Tabel 2 Dampak Kemiskinan

Dampak Kemiskinan	
Dampak	Keterangan
Pengangguran	Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, dengan sendirinya daya belinya rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengangguran adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali
Kriminalitas	Sulitnya mendapatkan pekerjaan bisa menimbulkan orang lupa diri. Lalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah cara melanggar hukum atau tidak (jalan pintas yang tidak halal)
Pendidikan	Ketiadaan biaya pendidikan, atau terpaksa bekerja di usia sekolah, berakibat pada putusnya Pendidikan
Kesehatan	Tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, telah berakibat buruknya gizi, terutama bagi anak-anak; juga tidak terawatnya kesehatan karena sanitasi yang buruk, tempat tinggal yang kumuh, dan seterusnya
Suramnya Masa Depan Generasi Muda	Karena anak-anak kekurangan gizi, kesehatan yang tidak terawat, pendidikan yang terputus karena ketiadaan biaya dan atau terpaksa bekerja, hal itu akan menimbulkan gangguan pada anak-anak seperti gangguan mental, fisik, dan cara berpikir.

Meskipun bantuan sosial tetap berjalan, namun angka kemiskinan di kota Medan masih tetap tinggi, karena bantuan sosial tersebut bukanlah program untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan hanya sekedar mengatasi kebutuhan dasar. Berikut disajikan data Badan Pusat Statistik tentang penduduk miskin di kota Medan, dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Kota Medan

2018	2019	2020	2021	2022
186.450	183.790	183.540	193.030	187,084

Selanjutnya, data BPS juga memperlihatkan kepada kita tentang garis kemiskinan yang diukur dari nilai rupiah, yang dibelanjakan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

Tabel 4 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Kota Medan

2018	2019	2020	2021	2022
518.420	532.055	553.796	557.126	607.166

Dari table tersebut terlihat bahwa setiap tahun memang terjadi peningkatan. Namun, seiring dengan itu harga-harga kebutuhan pokok juga naik. Angka-angka itu memberi petunjuk, jika setiap penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya berada di bawah angka tersebut berarti mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Di kota Medan, hampir seluruh kelurahan mendapatkan bantuan sosial. Satu di antara kelurahan yang termasuk mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah Kelurahan Sidorejo Timur. Kelurahan ini terletak di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Kelurahan ini mengalami perkembangan yang cukup lumayan sebagai daerah jasa perdagangan, pemukiman dan lain-lain. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, melaporkan Kecamatan Medan Tembung memiliki jumlah keluarga sekitar 154.599 pada tahun 2021, Terdapat sekitar 6.918 keluarga yang merupakan prasejahtera/miskin.

Tabel 5

Peta Penduduk dalam Lingkup Kelurahan Sidorejo	
Jumlah Penduduk	21.583 jiwa
Jumlah Penduduk Dewasa	19.875 jiwa
Jumlah laki-laki	10.187 jiwa

Jumlah Penduduk Perempuan	11.96 jiwa
Jumlah KK	4.945 KK
Jumlah KK Miskin	1.101KK
Jumlah Penduduk Miskin	4.404 jiwa

Sumber : Data Kelurahan Sidorejo, diolah penulis

Tabel 6 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (KPH) Lingkungn 8 Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
282	8	30	31	30

Sumber : Data Kelurahan Sidorejo, diolah penulis

Sekalipun bantuan sosial tetap berjalan selama 5 tahun ini, namun keluarga penerima manfaat program ini masih tetap berada dalam kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah program untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan hanya sekedar jaring pengaman sosial (*social safety net*). Masalahnya, mengapa pemerintah lebih memilih melakukan program jaring pengaman sosial, daripada program pengentasan kemiskinan?

#### F. Penutup

Tidak dapat dibantah bahwa pembangunan ekonomi yang diselenggarakan selama ini memang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun pergerakannya sangat lambat. Antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan tidak berjalan paralel. Justru yang terlihat jurang atau kesenjangan pendapatan makin lebar. Penurunan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang merata sesungguhnya

akan berjalan lebih baik dari sebelumnya jika pemerintah menjalankan program pengurangan kemiskinan yang sesuai dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu terjadi, dan memang sesuai dengan kondisi lokal baik internal maupun eksternal masyarakat miskin tersebut.

Beberapa pemikiran penanggulangan kemiskinan sudah ditawarkan pada pemerintah, antara lain misalnya, *pertama*, penetapan kegiatan setiap program penanggulangan

kemiskinan semestinya sesuai dengan kebutuhan setempat (*local need*), dengan pola pengelolaan kegiatan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat (*community based management*) sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam seluruh proses pelaksanaannya. *Kedua*, adanya sinkronisasi antara tujuan program dengan masalah yang dihadapi masyarakat miskin. *Ketiga*, terdapat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi dan pemantauan. Dengan begitu, posisi orang miskin sebagai aktor dalam memberdayakan diri mereka sendiri. *Keempat*, pengidentifikasi nama, jumlah, dan penyebaran penduduk miskin harus dilakukan dari bawah ke atas (*bottom up*), karena masyarakat sendirilah yang lebih mengetahui sesama warga desanya yang hidup dalam keadaan miskin. *Kelima*, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindangi; dan *keenam*, keadilan akan tercapai jika situasi politik, sosial, budaya, dan keamanan kondusif untuk melaksanakan pembangunan<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ibid, Maryam Sangaji... hal. 35.

Selanjutnya, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan tentang bantuan sosial khususnya program jaring pengaman sosial (*social safety net*). Sebab bantuan sosial bagi orang miskin yang terus menerus tidak akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebab jaring pengaman sosial hanyalah obat penenang, bukan mengatasi penyakit kemiskinan, karena hanya untuk membantu mengatasi kebutuhan dasar (*basic need*) warga miskin. Selama ini yang terjadi, setiap pemerintah yang berkuasa selalu menggunakan senjata bantuan sosial, jaring pengaman sosial untuk kepentingan politik 5 tahunan, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh mengeluarkan masyarakat miskin itu dari kemiskinannya.

#### Daftar Pustaka

Ahmad Erani Yustika, (ed).  
Perekonomian Indonesia,  
Deskripsi, Preskripsi, &  
Kebijakan. Malang : Bayu Media  
Publishing, 2005.

\_\_\_\_\_. Perekonomian  
Indonesia, Satu Dekade

- Pascakrisis Ekonomi. Malang : BPFE-UNIBRAW, 2007
- Anggito Abimanyu dan Andie Megantara (ed). Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta : Kompas, 2009.
- Lincoln Arsyad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi, 1999.
- Michael P.Todaro. & Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi ke 9, Jakarta: Erlangga, 2006
- \_\_\_\_\_. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga. 1994.
- Mudrajad Kuncoro. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.
- Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teori dan Sejarah. Jakarta : Kencana, 2016.
- Tulus T.H. Tambunan. Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Windhu Putra. Perekonomian Indonesia. Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019..